

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 27 Februari – 1 Maret 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Sabtu, 27 Februari 2021	Proyek 4 Bendungan di Jawa Timur Rampung 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) manargetkan menyelesaikan pembangunan empat bendungan di Jawa Timur pada 2021, yakni Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Bendungan Bendo di Ponorogo, dan Bendungan Gongseng di Bojonegoro. https://www.liputan6.com/bisnis/real/4493779/proyek-4-bendungan-di-jawa-timur-rampung-2021 https://www.antaranews.com/berita/2019582/kementerian-pupr-targetkan-4-bendungan-di-jawa-timur-rampung-tahun-ini
		Sabtu, 27 Februari 2021	Dukung Pariwisata Manado-Bitung-Likupang, 45 Km Jalan Selesai Diperbaiki	Dalam rangka mendukung pemulihan sektor pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Salah satunya di DPSP Manado-Bitung-Likupang, Sulawesi Utara. https://www.liputan6.com/bisnis/real/4493787/dukung-pariwisata-manado-bitung-likupang-45-km-jalan-selesai-diperbaiki https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/27/112013521/demi-destinasi-wisata-super-prioritas-manado-bitung-likupang https://www.antaranews.com/berita/2019594/kementerian-pupr-rampungkan-peningkatan-jalan-di-dpsp-manado-likupang
		Sabtu, 27 Februari 2021	Pemerintah Bangun 193 Rumah Khusus di Wamena Senilai Rp 74,2 Miliar	Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 193 unit rumah khusus (rusus) bagi warga di Kabupaten Wamena, Papua yang rusak akibat kerusuhan beberapa waktu lalu. https://www.liputan6.com/bisnis/real/4494126/pemerintah-bangun-193-rumah-khusus-di-wamena-senilai-rp-742-miliar

2	Detik.com	Sabtu, 27 Februari 2021	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II Selesai Agustus	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 kilometer (km). Kehadiran Jalan Tol Ciawi-Sukabumi dapat menjadi jalan alternatif menuju Jawa Barat bagian Selatan terutama bagi angkutan logistik yang selama ini harus berhadapan dengan kemacetan pada ruas Jalan Ciawi-Cigombong-Cicurug-Cibadak. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5474189/wuzzz-jalan-tol-ciawi-sukabumi-seksi-ii-selesai-agustus?_ga=2.193710825.578560456.1614540925-390262722.1614540925
3	Antaranews.com	Minggu, 28 Februari 2021	UMM gandeng Kementerian PUPR-BNPP bangun RS Lapangan COVID-19	Universitas Muhammadiyah Malang menggandeng Kementerian PUPR-BNPP membangun RS Lapangan COVID-19 di kawasan RSU UMM untuk menangani pasien COVID-19. https://www.antaranews.com/berita/2019702/umm-gandeng-kementerian-pupr-bnpp-bangun-rs-lapangan-covid-19
4	Okezone.com	Minggu, 28 Februari 2021	Menteri Basuki Berberkan Keuntungan Adanya Food Estate	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (food estate). https://economy.okezone.com/read/2021/02/28/320/2369683/menteri-basuki-beberkan-keuntungan-adanya-food-estate https://www.antaranews.com/berita/2020299/jaga-ketahanan-pangan-pupr-kembangkan-lumbung-pangan-berkelanjutan https://akurat.co/ekonomi/id-1279416-read-menteri-basuki-lumbung-pangan-tiap-daerah-punya-karakter-dan-tantangan-berbeda

Judul	Target Ambisius KPR Subsidi	Tanggal	1 Maret 2021
Media	Koran Tempo		
Resume	Pemerintah diminta menaikkan lagi kuota bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada 2022 menjadi 230.000 unit dari usulan sebanyak 200.000 unit		

JAKARTA – Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Arief Sabaruddin, optimistis realisasi penyaluran program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan meningkat pada tahun ini. "Permintaannya masih sangat besar," kata dia, kemarin. Pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran FLPP sebesar Rp 19,1 triliun untuk membiayai 157.500 unit rumah.

Arief menuturkan sebanyak Rp 16,62 triliun dari dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Sedangkan sisanya senilai Rp 2,5 triliun merupakan pengembalian pokok dari program serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Anggaran tahun ini meningkat jauh dari anggaran pada 2020 yang sebesar Rp 11 triliun untuk pembiayaan 109.253 unit rumah.

Ia mengatakan, meski kuantitas pembiayaan semakin tinggi, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas unit rumah. Menurut Arief, lembaga yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu telah meluncurkan aplikasi SiPetrak untuk memantau kualitas bangunan dengan mengandalkan kecerdasan buatan. Aplikasi ini ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Juli 2021.

Hingga pekan lalu, dia mengimbulkkan, anggaran FLPP senilai Rp 47,82 miliar telah disalurkan oleh delapan bank. Dana tersebut dipakai untuk membiayai pembangunan 443 unit rumah. Arief mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah menggandeng sembilan bank nasional dan 29 bank pembangunan daerah untuk menyalurkan FLPP.

Selain untuk FLPP, pemerintah menganggarkan dana untuk program bantuan pembiayaan perumahan lainnya. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum, Eko Djoeli Heripoerwanto, menyatakan total anggaran pembiayaan perumahan mencapai hampir Rp 26 triliun, termasuk anggaran FLPP.

Dia menjelaskan, sebanyak Rp 2,67 triliun disalurkan sebagai bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) terhadap 66.750 unit rumah. Selain itu, tersedia pembiayaan dengan skema subsidi selisih bunga senilai Rp 5,96 triliun untuk 859.582 unit rumah. Selanjutnya, ada subsidi bantuan uang muka senilai Rp 630 miliar untuk 157.500 unit rumah.

"Kebijakan pemerintah ini seharusnya memberi lampu hijau bagi pengembang dan bank untuk menggenjot penyaluran kredit rumah bersubsidi," ucapnya.

Sekretaris Perusahaan PT Bank BRI (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menyebutkan perusahaan berencana menyalurkan kredit pemilikan rumah bersubsidi sebanyak 6.000 unit pada tahun ini. Jumlah tersebut sama dengan realisasi penyaluran kredit sejenis pada 2020. "Kami optimistis dapat memenuhi kuota penyaluran tahun ini," tutur Oryza.

Guna mendorong penyerapan KPR subsidi, BRI telah membuka layanan sampai unit kerja level kantor cabang pembantu untuk melayani program ini. Perusahaan juga melakukan inovasi dengan mengadakan program akad massal secara daring. BRI pun masih gencar mengadakan pameran secara virtual.

Adapun PT Bank BTN (Persero) Tbk berencana menyalurkan dana FLPP senilai Rp 8,73 triliun untuk pembiayaan 81 ribu unit rumah. Pelaksana tugas Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan dana tersebut akan disalurkan melalui program KPR subsidi konvensional senilai Rp 7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp 965 miliar.

Program yang disiapkan berupa KPR Sejahtera hanya dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah. "Melalui fasilitas KPR subsidi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan uang muka mulai dari 1 persen dan suku bunga 5 persen, tetap hingga 20 tahun," kata Nixon.

Sekretaris Perusahaan BTN, Ari Kurniawan, berujar bahwa perseroan optimistis realisasi penyaluran KPR subsidi tetap positif dengan ditunjang berbagai stimulus dari pemerintah. Pemerintah juga berkomitmen mempertahankan anggaran APBN untuk subsidi perumahan melalui skema FLPP ataupun BP2BT. "Pada tahun lalu KPR bersubsidi tetap tumbuh 7,7 persen, di atas pertumbuhan kredit bank BTN," katanya. BTN menargetkan pertumbuhan KPR subsidi terjaga pada 4-6 persen secara tahunan.

Judul	Menyoal Tata Kelola Air di Lumbung Pangan	Tanggal	1 Maret 2021
Media	Media Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	PROGRAM lumbung pangan yang digulirkan pemerintah membutuhkan dukungan tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprioritaskan penanganan drainase, sehingga lahan tidak tergenang dan bisa terus ditanami.		

Menyoal Tata Kelola Air di Lumbung Pangan

PROGRAM lumbung pangan yang digulirkan pemerintah membutuhkan dukungan tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprioritaskan penanganan drainase, sehingga lahan tidak tergenang dan bisa terus ditanami.

“Pengembangan lumbung pangan berkelanjutan harus segera diwujudkan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi. Lumbung pangan juga upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam webinar di depan peserta Kongres Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID) yang digelar di Bandar Lampung, Sabtu-Minggu (27-28/2).

Pemerintah tengah mengembangkan *food estate* di lahan seluas 165 ribu hektare di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain itu, program pengembangannya juga menyebar Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

“Dalam pengembangan *food estate*, terdapat beberapa tantangan, meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan, dan pembiayaan. Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat

solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan,” ujar Basoeki.

Menteri Basoeki berharap kongres KNI-ID dapat menajaring pemikiran dan merumuskan solusi terbaik untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada pengembangan *food estate* di berbagai wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyatakan Lampung mendukung pengembangan *food estate* serta siap menjadipenopang ketahanan pangan nasional. “Di masa pandemi, kami mampu meningkatkan produksi sektor pertanian hingga 20% dibanding tahun sebelumnya.”

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Karomani menambahkan pembangunan berbasis riset dibutuhkan untuk mewujudkan lumbung pangan berkelanjutan. “Adanya *food estate* akan kembali memperkuat ketahanan pangan Indonesia.”

Ketahanan pangan juga jadi tekad Gubernur Riau Syamsuar. Ia mengaku sudah mencadangkan lahan seluas 30 ribu hektare. “Lahan berada di tiga kabupaten yang sudah siap mendukung program ketahanan pangan. Kami sudah menyampaikan permohonan persetujuan program pengembangan pangan ke Kementerian Pertanian,” tandasnya. (EP/RK/Ant/N-3)

Judul	Perbaikan Tanggul Terus Dikebut	Tanggal	1 Maret 2021
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR)Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, pascabanjir di Kabupaten Bekasi, ada 14 titik tanggul di Sungai Citarum Hilir di Kabupaten Bekasi yang kritis. Kementerian PUPR fokus pada lima titik tanggul Sungai Citarum yang jebol		

Perbaikan Tanggul Terus Dikebut

Rekayasa teknik semata tidak cukup untuk mencegah banjir di kawasan hilir Citarum. Dibutuhkan pula rekayasa vegetasi dan pemulihan daerah aliran sungai yang kritis.

BEKASI, KOMPAS — Perbaikan lima titik tanggul Sungai Citarum Hilir yang jebol di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hampir rampung pada Minggu (28/2/2021). Di Citarum Hilir, secara keseluruhan ada 14 titik tanggul yang kritis dan butuh perbaikan segera.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, pascabanjir di Kabupaten Bekasi, ada 14 titik tanggul di Sungai Citarum Hilir di Kabupaten Bekasi yang kritis. Kementerian PUPR fokus pada lima titik tanggul Sungai Citarum yang jebol.

"Hari ini sudah hampir rampung, sudah dalam tahap finishing. Tugas kami saat ini memperhatikan titik-titik yang lain karena berdasarkan perkiraan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), potensi curah hujan sampai awal Maret 2021," kata Firdaus saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Lima titik tanggul Sungai Citarum yang jebol berada di Kampung Babakan Banten, Desa Sumber Urip (Pebayuran), sepanjang 50 meter; Kampung Solokan Kendal dan Kampung Biyombong, Desa Pantai Bahagia (Muara Gembong), sepanjang 90 meter; Desa Pantai Mekar (Muara Gembong) sepanjang 10 meter. Dua titik lain ada di Desa Sumber Jaya dan Desa Pantai Bahagia (Muara Gembong).

Firdaus menambahkan, selain memperbaiki tanggul yang jebol, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi curah hujan di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca itu membantu mempercepat perbaikan tanggul-tanggul di Sungai Citarum yang jebol.

"Tanggul-tanggul yang kritis



Anggota Pramuka dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Kwarcab) Kota Bekasi mengikuti kegiatan *fun game* di tepi Soluran Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (28/2/2021). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan para anggota Pramuka untuk membantu penanganan korban banjir.

juga kami perbaiki karena kami tidak ingin ada kejadian lagi (tanggul jebol). Tetapi, yang jelas, sesuai permintaan Presiden, kami tangani terlebih dahulu titik-titik tanggul yang menyebabkan banjir besar itu," ucap Firdaus.

Presiden Joko Widodo saat meninjau tanggul yang jebol di Kampung Babakan Banten, Rabu (24/2), meminta agar perbaikan tanggul diselesaikan secepatnya. "Saya memberi target maksimal dua hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semua berfungsi normal kembali," kata Presiden

(Kompas, 24/2).

Adapun berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, hingga Jumat (26/2), banjir masih menggenangi 71 lokasi di 30 desa atau kelurahan di delapan kecamatan. Sejumlah 16.409 keluarga terdampak banjir hingga setinggi 75 sentimeter di 71 lokasi.

Banjir yang melanda sejak 20 Februari 2021 juga mengakibatkan 19.433 hektar sawah di daerah itu terendam banjir. Area persawahan yang paling parah terdampak banjir ada di wilayah utara Kabupaten Be-

kasi, seperti Kecamatan Pebayuran, Kedungwaringin, Sukatani, Sukakarya, Tambelang, Cabangbungin, Sukawang, dan Kecamatan Muaragembong. Sebagian diperkirakan gagal panen.

Rekayasa vegetasi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, luapan Sungai Citarum yang berdampak pada jebolnya sejumlah tanggul Sungai Citarum akibat debit air yang melebihi kapasitas normal. Dalam keadaan normal, debit air di Citarum maksimal

800 meter kubik per detik. Saat Sungai Citarum meluap, 20 Februari, debit air mencapai 1.300 meter kubik per detik.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Melki W Paendong, dihubungi secara terpisah, mengatakan, curah hujan tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya luapan banjir di Citarum hilir. Namun, curah hujan yang tinggi itu tidak didukung dengan ketersediaan area tangkapan air sehingga sebagian besar air hujan mengalir langsung ke sungai.

"Curah hujan itu jatuhnya tidak langsung ke sungai, tetapi

kemampuan *catchment area* (daerah tangkapan air) sudah berkurang karena lebih banyak kawasan terbangun. Akhirnya, semua larinya ke Citarum dan berlebih sehingga menjebol tanggul," katanya.

Di Jabar, Program Citarum Harum yang dicanangkan pemerintah sejak 2018 untuk memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum masih terus berjalan. Pada 2020, sebanyak 1.800 hektar lahan kritis di DAS Citarum sudah ditanami sekitar 1 juta pohon.

Ada sekitar 77.000 hektar lahan kritis di DAS Citarum. Pemulihan lahan kritis itu membutuhkan sekitar 45 juta pohon (Kompas, 22/12/2020).

Pemulihan Citarum sangat esensial lantaran sungai sepanjang 297 kilometer itu mengairi lahan pertanian seluas 420.000 hektar di lumbung padi nasional Karawang, Subang, dan Indramayu. Melalui tiga waduknya, yakni Saguling, Citarata, dan Jatiluhur, Citarum menghasilkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 1.880 MW. Listrik itu memasok interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali untuk menerangi lebih dari setengah penduduk negeri ini di Pulau Jawa dan Bali.

Meiki menambahkan, pemulihan lahan kritis di Sungai Citarum sedang berproses dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Penanganan pengendalian banjir di Citarum juga selama ini dinilai lebih fokus pada rekayasa teknik sipil, seperti pembuatan sedot, polder, dan kolam retensi.

"Rekayasa sipil jangan dijadikan sebagai andalan utama. Harus ada rekayasa vegetasi, termasuk pemulihan lahan kritis, dan harus ada pembatasan izin untuk pembangunan kawasan terbangun. Kalau sudah terbangun, lalu air ke sungai makin besar," ucapnya. (VAN)

Judul	Stimulus Lewat Perbaikan Rutilahu	Tanggal	1 Maret 2021
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 21)		
Resume	Disperkim Jabar bakal berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program RISA (Rumah Instan Sederhana Sehat). "Kami akan coba usulkan melalui program tersebut untuk perbaikan rumah warga yang rusak karena bencana," tuturnya.		

| PEMULIHAN EKONOMI |

STIMULUS LEWAT PERBAIKAN RUTILAHU

Bisnis, BANDUNG — Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang digulirkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan hunian sehat, tetapi juga menstimulus pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Redaksi
bandung@bisnis.com

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Boy Iman Nugraha mengatakan program perbaikan rutilahu dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

"Satu perbaikan rutilahu bisa mempekerjakan tiga sampai empat orang. Belum lagi material dan bahan baku bisa menggerakkan ekonomi," kata Boy, pekan lalu.

Menurut dia, perbaikan rutilahu harus dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi lokal dengan cara menggunakan tenaga kerja setempat. Termasuk bahan baku yang digunakan.

Pemda Provinsi Jabar menganggarkan Rp560 miliar untuk memperbaiki 31.500 unit rutilahu sepanjang 2021 di 27 daerah. Jika satu rumah mempekerjakan tiga sampai empat orang, maka akan ada sekitar 125.000 lapangan kerja dari program perbaikan rutilahu.

Setiap keluarga penerima manfaat program rutilahu akan diberi bantuan senilai Rp17,5 juta. Bantuan tersebut untuk material bangunan Rp16,5 juta. Sisanya untuk upah tenaga kerja dan administrasi. Semua keluarga penerima manfaat program rutilahu akan menerima bantuan dalam bentuk fisik (material bahan bangunan).

"Multiplier effect-nya diharapkan

hunian sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan penghuninya, meningkatkan produktivitasnya, pendapatannya, ekonominya, dan kesejahteraannya," tuturnya.

Menurut Boy, keluarga calon penerima manfaat program rutilahu merupakan hasil usulan desa/kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Usulan tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, serta terdaftar dalam Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota se-Jabar dan Pemerintah Pusat).

"Syarat CPCL (Calon Penerima, Calon Lokasi) antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), luas ruang yang mencukupi," ucapnya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar juga mengalokasikan 150 unit untuk perbaikan rumah yang rusak karena bencana.

Saat ini, kata Boy, pihaknya sedang mengusulkan peralihan rutilahu reguler untuk perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.

"Perbaikan rumah akibat bencana berbeda dengan rutilahu. Tapi, kami akan menganggarkan 150 unit dari program rutilahu untuk menangani bencana di Jawa Barat," katanya.

“

Multiplier effect-nya diharapkan hunian sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan penghuninya.

Boy melaporkan, sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengusulkan 15 unit rumah yang rusak akibat bencana untuk diperbaiki melalui program rutilahu. Disperkim Jabar pun sedang menginventarisasi rumah yang rusak akibat bencana banjir di Kabupaten Bekasi.

"Kami akan memperbaikinya setelah kedaruratan. Sekarang masih dalam masa kedaruratan, kita belum bisa bekerja. Tapi, kami sekarang sedang menginventarisasi usulan-usulan dari Kabupaten Bekasi," ucapnya.

Selain melalui program perbaikan rutilahu, perbaikan rumah yang rusak akibat bencana akan diupayakan lewat anggaran Belanja Tak Terduga.

Disperkim Jabar bakal berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program RISA (Rumah Instan Sederhana Sehat). "Kami akan coba usulkan melalui program tersebut untuk perbaikan rumah warga yang rusak karena bencana," tuturnya.

Menurut Boy, saat ini pihaknya sudah merelokasi warga Sumedang terdampak bencana longsor di Cimanggung ke apartemen milik Pemda Provinsi Jabar.

"Kami punya apartemen transit, dan kurang lebih 16 unit yang digunakan untuk pengungsi dari Cimanggung. Unit tersebut diisi oleh 11 sampai 12 kepala keluarga," katanya.

"Karena dalam kondisi darurat, ada satu KK yang huni dua unit. Itu karena situasinya tidak memungkinkan satu KK gunakan satu unit. Ada kelonggaran syarat dalam situasi darurat," imbuhnya.

Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon menganggarkan dana sebesar Rp3 miliar untuk memperbaiki rutilahu pada 2021 ini.

Anggaran tersebut dihimpun dan dikelola dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 8/2001.

Komisioner Bidang Pengumpulan dan Pelaporan Baznas Kabupaten Cirebon Ahmad Zaeni Dahlan mengatakan anggaran yang sudah

dipakai sebanyak Rp570 juta.

"Kami sudah perbaiki 14 rumah yang di tiga desa di Kecamatan Plered. Kemudian, yang sedang dalam progres ada di Desa Lungbenda, jadi total 16," kata Ahmad Zaeni.

Tahun lalu, Baznas Kabupaten Cirebon memperbaiki 220 unit rutilahu. Angka tersebut melebihi target awal, yakni 190 unit.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan jumlah rutilahu di Kabupaten Cirebon sebanyak 18.000 lebih. Tahun ini pun, hanya sebanyak 885 saja yang diperbaiki oleh pemerintah.

"Kami juga mengajak masyarakat ikut andil untuk membantu warga yang membutuhkan. Karena kalau dari Pemkab Cirebon maupun Provinsi prosesnya lumayan panjang," katanya.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon Cirebon terbantu dengan kehadiran Baznas. Hadirnya lembaga tersebut, mampu dalam mengatasi sebagian permasalahan ekonomi di masyarakat.

Imron mengatakan, selain memberikan rutilahu, Baznas juga membantu warga yang tidak mempunyai biaya perawatan di rumah sakit, beberapa di antaranya dibiayai hingga kembali pulih.

"Baznas juga setiap bulan memberikan bantuan kepada warga yang kesusahan maupun terkena bencana," kata Imron. **(K57, K45) E3**